**Penerapan Full Day School, Sukoharjo Harap Jam Belajar Dipangkas**

<http://joglosemar.co/2016/09/penerapan-full-day-school-sukoharjo-harap-jam-belajar-dipangkas.html>



**SUKOHARJO —**Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo belum dapat memastikan apakah daerahnya masuk dalam salah satu daerah yang bakal menjadi pilot project program full day school.

Kendati demikian, Pemkab Sukoharjo menyebut kondisi geografis di Sukoharjo memungkinkan untuk menerapkan program tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Darno mengatakan, sejauh ini belum ada informasi mengenai uji coba sekolah seharian itu. Menurut dia, Sukoharjo siap mendukung dan melaksanakan full day school yang digagas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Insya Allah Sukoharjo siap menerapkan (full day school). Kondisi geografis Sukoharjo memungkinkan untuk itu,” tutur Darno saat ditemui di DPRD Sukoharjo, Selasa (20/9/2016).

Darno mengatakan, penerapan full day school tetap akan ada konsekuensi, yakni memangkas struktur jam belajar dalam sistem pendidikan Kurikulum 2013. Dia menjelaskan, saat ini struktur jam belajar kurikulum 2013 sebanyak 46 jam untuk enam hari sekolah. Menurutnya, jika full day school diterapkan tanpa mengubah durasi jam belajar, waktu siswa akan habis di sekolah.

“Bayangkan kalau dibagi hanya dengan lima hari sekolah. Pulang jam berapa siswa nanti. Karena itu struktur jam kurikulum 2013 harus dikurangi,” jelasnya.

Karena itu, Darno menilai, penerapan full day school harus diiringi dengan perombakan Kurikulum 2013 ini, salah satunya jam belajar siswa dikurangi menjadi 40 jam sepekan.

“Misal hari Sabtu full untuk ekstrakurikuler, sama saja nanti masuk enam hari. Kalau jam belajar menjadi 40 jam, sore masih bisa untuk kegiatan ekstra kurikuler,” terangnya.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, KMA Dina Putri mengatakan, pada dasarnya sistem full day school yang digagas pemerintah pusat dirancang untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Karena itu, Dinas Pendidikan harus mempersiapkan diri menyambut penerapan sistem tersebut.

“Karena ini program Pemerintah Pusat, segala sesuatunya lebih baik segera disiapkan. Dinas pendidikan harus lebih tahu sekolah mana yang sudah siap untuk menjadi pilot project,” tutur Dina.